



Contents lists available at [Journal IICET](#)

Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Evaluasi implementasi program pendidikan gratis di kota Padang Sidempuan

Freddy Sanda P.H^{*}, Nurhizrah Gistituati

Universitas Negeri Padang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 20th, 2023

Revised Feb 22th, 2023

Accepted Mar 27th, 2023

Keyword:

Implementasi program Pendidikan gratis

ABSTRACT

Kebijakan program Pendidikan gratis memberikan harapan yang sangat besar bagi Sebagian besar masyarakat, hal ini disebabkan karena banyaknya keluarga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya diakibatkan faktor ekonomi yang sulit. Tujuan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang implementasi pelaksanaan program pendidikan gratis, mengetahui implementasi kebijakan pendidikan gratis berjalan dengan efektif dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program pendidikan gratis. Metode peneltian yang digunakan adalah penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SLTP Negeri Kota Padang Sidempuan menggunakan metode wawancara, data naratif, catatan lapang dari pengamatan dan dokumentasi tertulis lainnya. Hasil penelitian kebijakan pendidikan gratis yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan sangat ideal dan mulia, tapi pada tataran implementasi kebijakan masih ditemukan adanya hambatan dan gesekan dari sisi koordinasi pemerintahan dengan para bupati/walikota, baik secara teknis maupun secara administratif. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Efektifitas Implementasi pendidikan gratis dari segi Efektivitas, tujuan kebijakan sudah dicapai, sehingga implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan sudah efektif dan efisiensi.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Sanda P.H. F.,
Universitas Negeri Padang, Indonesia
Email: freddysanda945@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan jalan bagi masyarakat untuk dapat mengakses lebih jauh berbagai sektor demi mendapatkan hidup yang layak (Zahrawati 2020). Pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi dalam suatu negara tentunya harus memberikan akses yang dapat dijangkau dengan mudah bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan (Samrin 2015). Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia dalam mengembangkan potensi diri dan kepribadian baik secara rohani maupun jasmani (Diasuti, 2017). Dalam UU No. 20 Thn. 2003 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, sehingga pemerintah menyelenggarakan pendidikan gratis, yang salah satunya dengan penetapan bantuan operasional sekolah (BOS). Penetapan kebijakan pendidikan gratis disebabkan karena masih terdapat

anak usia sekolah pada kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena tingginya biaya pendidikan. Mengetahui hal tersebut, pemerintah Kota Padang Sidempuan berupaya memberikan bantuan biaya pendidikan sekaligus fasilitas pendidikan termasuk seragam sekolah agar anak-anak tersebut dapat mengenyam pendidikan yang sama (Mahendra, 2020).

Salah satu program unggulan pemerintah Kota Padang Sidempuan dalam bidang pendidikan adalah Pendidikan Gratis. Pendidikan Gratis adalah suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang Sidempuan agar permasalahan biaya sekolah dapat teratasi. Hal ini dilakukan karena masyarakat menganggap terlalu besar biaya untuk menyekolahkan anaknya. Pendidikan Gratis adalah bantuan dana pendidikan dan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Padang Sidempuan. Program pendidikan gratis adalah salah satu layanan (*service*). Kebijakan publik adalah suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan pemerintah dengan stakeholders dalam mengatur mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik (Mulyadi, 2015). Memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan (Wahab, 2014).

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masalah pelayanan pendidikan, belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat semestinya diimplementasikan sesuai konstitusi yang ada, karena pada dasarnya pendidikan itu bukan saja hak kalangan tertentu, tetapi wajib diberikan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata. Kepentingan ini berkenaan dengan tujuan bangsa yang semestinya direalisasikan dengan baik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Sejalan dengan itu kebijakan dapat dimaknai lebih sebagai proses interaksi yang dilakukan negara dengan rakyat. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat dengan lingkup publik, yang artinya mencakup lingkup bersama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkup publik perlu adanya interaksi antara pemerintah dengan warganya dalam menentukan kebijakan terkait permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat (Suryono, 2014). Dari gambaran kondisi tersebut, proses pembuatan kebijakan dan berbagai pertimbangan yang meliputinya, khususnya terkait dengan tahapan perumusan kebijakan (*policy formulation*). Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan (Agustino, 2017).

Kebijakan program Pendidikan gratis memberikan harapan yang sangat besar bagi Sebagian besar masyarakat, hal ini disebabkan karena banyaknya keluarga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya diakibatkan faktor ekonomi yang sulit. Namun, pemberian program Pendidikan gratis masih kurang merata, karena masih banyak anak yang putus sekolah atau bahkan adanya siswa yang tidak dapat mengikuti ujian akibat tidak dapat melunasi iuran sekolah ataupun membeli instrumen pembelajaran lainnya. Oleh karena beberapa faktor tersebut perlunya ada evaluasi menyeluruh mengenai program Pendidikan gratis yang di sediakan pemerintah. Menurut Tyler dalam (Lazwardi, 2017) evaluasi adalah suatu proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Evaluasi atau penilaian adalah penentuan pencapaian tujuan suatu program. Dengan penilaian dapat diperoleh informasi yang akurat tentang bagaimana implementasi penyelenggaraan suatu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, sudahkah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sudah tepatkah sasaran kebijakan diterapkan. Tujuan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang implementasi pelaksanaan program pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan, mengetahui implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan berjalan dengan efektif dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif (Creswell., 2012, hal. 4-5) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Penelitian ini dilakukan pada SLTP Negeri Kota Padang Sidempuan menggunakan metode wawancara, data naratif, catatan lapang dari pengamatan dan dokumentasi tertulis lainnya (Sugiyono, 2017:9). Selain itu pendekatan kualitatif memberikan hubungan antara evaluator dengan stakeholders kebijakan yang mendalam untuk menemukan hasil dan rekomendasi dalam program pendidikan gratis dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan gratis di kota Padang Sidempuan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Gratis Kota Padang Sidempuan

Implementasi suatu kebijakan tidak hanya sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi belaka, melainkan lebih dari itu dalam mengimplementasikan kebijakan yang menyangkut kompleksitas, keputusan siapa, mendapat apa dari suatu kebijakan. Pemenuhan sumber daya dimaksud dapat berupa sarana, prosedur, dan lainnya yang mendukung implementasi secara efektif (Siswanto, 2012:82). Berdasarkan pendapat tersebut implementasi kebijakan pendidikan gratis diprogramkan oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan memang mudah dipahami secara abstrak dan seolah-olah dapat dilaksanakan, padahal dalam praktik pelaksanaannya senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber daya atau sumber-sumber kebijakan sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan gratis mudah dipahami tetapi kenyataannya pada tataran implmentasi masih terdapat beberapa temuan menjadi titik kelemahan berkaitan seperti yang dikatakan pihak kepala sekolah, yang mengatakan bahwa:

“Hasil kebijakan yang dicapai dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan belum maksimal. Karena apabila ditinjau dari ketercapaian tujuan dan sasaran kebijakan masih belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pencapaian kebijakan hanya cenderung tercapai di sekolah-sekolah yang ada di wilayah ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan”.

Karena tingkat pengawasan yang tinggi membuat sekolah-sekolah yang berada di wilayah ibukota kabupaten dan kecamatan berusaha melaksanakan kebijakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Walaupun ketercapaian hasil kebijakan di wilayah ibukota kabupaten dan kecamatan masih belum sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang ditetapkan. Namun pihak-pihak sekolah di wilayah tersebut telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh orangtua murid, mengatakan bahwa:

“Untuk sekolah-sekolah yang berada di pedesaan umumnya masih sangat rendah ketercapaian hasil kebijakan yang dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya faktor kontrol yang dilakukan oleh pihak yang berkaitan”.

Hasil kebijakan yang dicapai masih belum maksimal. Ketidakmasimalan pencapaian hasil kebijakan disebabkan oleh komunikasi kebijakan yang tidak berjalan, sehingga masyarakat atau stakeholder tidak bisa menjadi control dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan. Dampaknya ketercapaian tujuan dan sasaran kebijakan tidak dapat terawasi, sebab masih banyak *stakeholders* yang tidak mengetahui adanya keberadaan kebijakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis. Akibatnya masyarakat tidak bisa menuntut pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis yang sesuai dengan peruntukkannya. Karena fakta yang ada implementasi kebijakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis lebih cenderung kepada peruntukkan pembiayaan investasi daripada peruntukkan pembiayaan operasional dan biaya siswa. Pembiayaan investasi yang lebih terfokus kepada pembangunan fisik sekolah memang menjadi program andalan sekolah untuk mengalokasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan.

Dengan kondisi masyarakat Kota Padang Sidempuan, tidak sedikit anak-anak putus sekolah dan ada juga yang tidak mampu untuk sekolah karena biaya untuk sekolah, meskipun program dari pemerintah untuk sekolah Gratis, namun itu pun masih menjadi momok untuk masyarakat karna masih banyak pemungutan biaya yang dianggap itu memberatkan masyarakat. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas mengatakan bahwa :

“Fenomena pendidikan gratis dalam implementasinya masih terjadi di berbagai Kabupaten/Kota, jenis masalah dalam pendidikan gratis masih berwarna-warni, sebagaimana kondisi yang ada di Kota Padang Sidempuan. Dengan adanya pendidikan gratis yang di salurkan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun fenomena didalam pelaksanaannya masih terus terjadi. Apakah karena konsep pendidikan yang merupakan sinerjitas dari konsep pusat yang tidak searah sehingga fenomena ini masih menjalar atau konsep kabupaten/kota yang tidak mampu melakukan sebuah perencanaan kebijakan. Masalah tersebut dapat dilihat pada beberapa kondisi anak didik”.

Sentuhan pendidikan gratis terlihat masih terfokus pada siswa yang ada di sekolah, padahal pemerataan pendidikan dinilai sudah diimplementasikan seiring dengan penerapan pendidikan gratis. Landasan lahirnya konsep pendidikan gratis disebabkan kaerna tingginya angka putus sekolah yang disebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam konteks pembiayaan. Namun pada realitasnya, subtansi dari pelaksanaan belum menyentuh pada wilayah anak-anak yang putus sekolah. Disini terlihat bahwa kebijakan pendidikan dan konsep pemerataan terlihat masih simpang siur dan ambiguitas, antara perencanaan dengan tujuan yang akan

dicapai. Pendidikan gratis masih dinilai kurang maksimal, pasalnya program pendidikan gratis tersebut belum menyentuh anak putus sekolah. sentuhan program tersebut hanya sebatas pada anak yang kurang mampu.

Implementasi kebijakan pendidikan gratis diprogramkan oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan memang mudah dipahami secara abstrak dan seolah-olah mudah dilaksanakan, padahal dalam praktik pelaksanaannya tidak semudah dibayangkan. Implementasi kebijakan senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber daya atau sumber-sumber kebijakan sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraannya. Berdasarkan hal tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan melalui sekretaris daerah. Pertanggungjawaban secara terstruktur ini, identik dengan teorinya Ripley dan Franklin (dalam Joko W, 2001:12) yang didasarkan pada tiga aspek, yaitu: Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.

Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Gratis di Kota Padang Sidempuan

Kebijakan dalam proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan sudah diusahakan untuk dapat terwujud dengan baik. Namun dalam proses implementasinya, tentu saja masih ada hambatan-hambatan dan kendala untuk mencapai keberhasilan implementasi yang maksimal. Misalnya saja dalam upaya merealisasikan isi kebijakan seharusnya sudah tidak ada lagi keinginan atau kepentingan yang terselip dari pelaksana atau calon penerima kebijakan untuk tidak melaksanakannya dengan benar. Karena apabila kepentingan-kepentingan sudah terselip dalam proses implementasi, maka pencapaian hasil yang maksimal tidak akan mungkin dapat diwujudkan. Sama halnya dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis yang masih terselip kepentingan dari beberapa oknum pelaksana kebijakan, yang berdampak kepada penyampaian informasi yang tidak menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa:

“Tidak semua masyarakat dapat menerima informasi yang kongkrit dari implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Sidempuan”.

Ketersediaan SDM dengan kemampuan dan kapasitas yang dibutuhkan sudah cukup memadai. Apabila terjadi kekurangan dalam pelaksanaannya pun, setiap elemen pelaksana kebijakan akan saling memenuhi untuk bisa terpenuhinya kebutuhan akan SDM kebijakan. Namun dalam implementasi yang dilakukan, ternyata masih ada terselip kepentingan-kepentingan dari pelaksana kebijakan. Fakta ini membuat pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan harapan dan manfaat yang diinginkan. Sebab dengan adanya kepentingan tersebut, membuat informasi kebijakan pendidikan gratis tidak dapat diterima secara sistematis dan keseluruhan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan pedalaman pedesaan. Kondisi ini yang seharusnya dapat membantu masyarakat dalam meringankan beban pemenuhan pendidikan, malah membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dari para anak-anaknya. Oleh karena itu berikut adalah faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan gratis, yaitu:

- **Komunikasi**

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana kebijakan dengan para kelompok penerima kebijakan masih berjalan belum lancar yang diakibatkan oleh oknum-oknum tertentu yang mempersulit kelancaran informasi tentang implementasi pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan. Ketidaklancaran informasi dan sosialisasi tentang pendidikan gratis kepada masyarakat memang disebabkan ada beberapa oknum sekolah yang tidak menyampaikan informasi pendidikan gratis kepada masyarakat. Akibatnya informasi penting tentang implementasi pendidikan gratis di wilayah Kota Padang Sidempuan tidak seluruhnya diterima oleh masyarakat. Masyarakat yang banyak belum menerima informasi tentang implementasi pendidikan gratis umumnya berada di desa dan kecamatan yang jauh dari Kota Padang Sidempuan.

Ketidakmampuan dalam menyampaikan informasi yang lancar ini harus segera diatasi dan dicari solusinya, supaya seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang Sidempuan. Selain itu juga perlu dilakukan penindakan tegas terhadap oknum-oknum sekolah yang tidak memberikan informasi akan adanya pendidikan gratis di sekolah. Agar ada efek jera bagi para oknum yang menyimpan informasi tentang adanya pendidikan gratis. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah, menagatakan bahwa:

“Dalam mengatasi komunikasi yang terputus dalam penyampaian informasi tentang pendidikan gratis, pihak pelaksana kebijakan perlu lebih sering melakukan penyuluhan dan sosialisasi sampai ke tingkat desa. Supaya masyarakat memang benar-benar menerima informasi tentang adanya pendidikan gratis, beserta syarat dan kriteria penerimanya. Sebab dengan adanya pendidikan gratis ini masyarakat akan sangat terbantu dalam menyekolahkan anaknya dan menikmati indahnya dunia pendidikan”.

Komunikasi yang dilakukan masih belum lancar. Karena masih ditemukan oknum-oknum tertentu yang menghambat kelancaran informasi tentang adanya penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan. Apalagi modal komunikasi yang dikembangkan dalam upaya memberikan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan gratis sifatnya berjenjang. Tentunya saja masih ada pada jenjang-jenjang yang berbeda yang enggan memberikan informasi tentang keberadaan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan. Akibatnya pemerataan penerimaan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan gratis belum berjalan dengan baik. Faktanya masih ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang informasi pendidikan gratis dan banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang adanya penyelenggaraan pendidikan gratis.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi oleh pihak pelaksana kebijakan tentang komunikasi yang dikembangkan dalam penyampaian informasi penyelenggaraan pendidikan gratis kepada masyarakat, supaya informasi tersebut benar-benar dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu juga perlu dilakukan pengawalan dan pengawasan terhadap informasi penyelenggaraan pendidikan gratis kepada masyarakat. Agar informasi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dibutuhkan oleh masyarakat memang benar-benar dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya pengetahuan itu, masyarakat dapat mengikuti program kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang Sidempuan.

- Sumber Daya

Sumber daya yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis sudah sangat memadai. Apabila ditinjau dari kemampuan dan skill yang dimiliki umumnya pelaksana kebijakan sudah mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang cukup mendukung dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan. Walaupun dalam realitanya kemampuan dan skill yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan tidak merata, tetapi para pelaksana kebijakan selalu berusaha untuk saling menutupi agar setiap pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Kemudian apabila ditinjau dari pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksinya, para pelaksana kebijakan sudah bekerja berdasarkan beban kerja yang sudah diberikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Komite mengatakan bahwa:

“Setiap jenjang dan tingkatan pelaksana kebijakan sudah melakukan pembagian tugas dan fungsi dengan jelas, misalnya di level Dinas Pendidikan harus mengerjakan apa dalam proses implementasi, Kepala Sekolah harus mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat, anggota dewan harus mengawal kebijakan ini untuk berjalan sesuai dengan tuntutannya dan sebagainya”.

Berdasarkan hal tersebut pembagian tugas yang jelasnya ini dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik, walaupun masih ditemukan beberapa oknum yang masih belum dengan transparan untuk mengimplementasikan kebijakan ini kepada masyarakat. Tetapi secara totalitas, pihak pelaksana kebijakan sudah dengan baik menguasai tugas dan fungsinya dalam implementasi, tentu saja dengan menggunakan kemampuan dan skill yang dimiliki. Selain itu juga fasilitas yang disediakan, juga cukup mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan. Dimana setiap pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang dimiliki supaya kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sarannya.

Sumber daya yang dimiliki sudah cukup baik. Karena kemampuan, skill, pembagian kerja dan fasilitas yang mendukung sudah tersedia dengan memadai didalam diri pelaksana kebijakan dan wadah pelaksana kebijakan. Namun yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan adalah para perilaku pelaksana kebijakan. Dimana penyelewengan perilaku yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan membuat kebijakan ini tidak akan sampai kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat. Fakta ini terlihat dari banyaknya informasi tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis yang tidak tersampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kota Padang Sidempuan. Akibatnya banyak para masyarakat atau kelompok sasaran yang tidak menerima informasi tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis. Kondisi ini membuat proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis belum berjalan dengan maksimal, karena hanya sebagian kecil masyarakat saja yang baru menerima informasi ini. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras dari para

pelaksana kebijakan untuk bisa menyampaikan pesan dan amanah yang terkandung didalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis.

- Disposisi (Sikap Pelaksana)

Faktor disposisi sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan. Karena dengan adanya faktor ini yang mengedepankan pemahaman pelaksana kebijakan dalam implementasinya diharapkan kebijakan bisa sampai kepada kelompok sasaran dengan jelas. Sehingga dalam pelaksanaannya, setiap pelaksana kebijakan harus benar-benar menguasai dan memahami kebijakan ini dengan baik. Supaya dalam proses penyampaian kebijakan kepada kelompok sasaran, para penerima kebijakan juga menjadi sangat memahami tujuan dan maksud diimplementasikannya kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis.

Kemudian dari tingkat pemahaman pelaksanaan kebijakan juga dituntut respon yang tinggi dari para pelaksananya. Sebab dengan respon yang baik dalam implementasi kebijakan, setiap pelaksana kebijakan dapat mengetahui masalah dan hambatan yang ditemukan dalam implementasinya. Dengan adanya pengetahuan akan masalah dan hambatan tersebut, membuat para pelaksana dapat dengan segera mencarikan solusi untuk mengatasi hambatan dan masalah itu. Selain itu juga respon kebijakan yang baik akan membuat pelaksana kebijakan untuk bisa menampung aspirasi dan masukan dari stakeholders. Sehingga dari masukan dan aspirasi yang diterima dapat memperbaiki implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis menjadi lebih baik lagi. Kemudian insentif pelaksana kebijakan pada dasarnya sudah include dalam pendapatan yang diterimanya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan orangtua murid, mengatakan bahwa :

“Pelaksana kebijakan masih memiliki respon yang rendah. Hal ini tergambar dari masih banyaknya masyarakat yang belum menerima informasi tentang adanya implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan”.

Oleh karena itu informasi yang diberikan akan menjadi bahan dan masukan bagi masyarakat untuk mengetahui apakah dirinya bisa mengikuti program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang Sidempuan. Oleh karena respon yang dimiliki harus sejalan dengan pemahaman kebijakan yang dipunya oleh pelaksana kebijakan. Sebab melalui tingkat pemahaman pelaksana kebijakan yang baik, tentunya akan dapat mensosialisasikan dan menjelaskan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis dengan baik.

- Struktur Birokrasi

Proses implementasi kebijakan memang sangat dibutuhkan struktur birokrasi yang jelas, sehingga dengan struktur pelaksana yang jelas dan mendukung diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan, juga membutuhkan peran serta kelembagaan lokal untuk mendukungnya. Karena peran serta lembaga lokal akan menjadi alat control dan pengawas bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis. Sebab lembaga lokal akan mengawasi dan memberikan masukan kepada pihak pelaksana kebijakan tentang kekurangan dan kelemahan yang ditunjukkan pada pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis.

Dimana masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana kebijakan dalam upaya memperbaiki dan membenahi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis. Selain itu juga keterlibatan stakeholders dalam proses implementasi kebijakan juga sangatlah penting, supaya implementasi kebijakan memang benar-benar dapat tepat sasaran. Untuk itu partisipasi *stakeholders* sangat dibutuhkan untuk memberitahukan kesalahan dan penyelewengan dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah mengatakan bahwa:

“Keterlibatan lembaga lokal dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan masih cukup kecil. Akibatnya pengawasan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis belum berjalan dengan maksimal”.

Realita ini tergambar dengan rendahnya kepedulian lembaga lokal terhadap masyarakat yang tidak menerima informasi tentang penyelenggaraan pendidikan gratis. Seharusnya sebagai lembaga lokal yang selalu mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah, lembaga tersebut harus tanggap akan ketidakadilan informasi yang diterima dikelompok masyarakat.

Sehingga nantinya seluruh masyarakat di wilayah Kota Padang Sidempuan memang bisa menerima informasi tentang pendidikan gratis. Bahkan kebanyakan lembaga lokal bisa memperjuangkan para masyarakat yang belum menerima untuk bisa menerima sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang sesuai dengan aturan. Oleh karena itu sangat diharapkan sekali keterlibatan lembaga lokal untuk mengawal pelaksanaan kebijakan ini dengan lebih baik. Sebab keterlibatan lembaga lokal yang diberikan akan menjadi harapan bagi seluruh kelompok sasaran agar bisa mengikuti program dengan benar. Maka dari itu partisipasi lembaga lokal sampai ke tingkat desa dalam mensosialisasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis, akan menjadi gerbang terselenggaranya kebijakan yang benar-benar menyentuh seluruh masyarakat di wilayah Kota Padang Sidempuan.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kota Padang Sidempuan Berjalan dengan Efektif

Menurut Dunn ada enam kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan (Dunn, 2003), yaitu:

- Efektivitas, Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 tahun 2013 tentang pendidikan gratis disebutkan bahwa pendidikan gratis bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, peserta didik/orang tua peserta didik. Hasil penelitian yang penulis lakukan efektivitas pelaksanaan pendidikan gratis sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat yang banyak menyatakan bahwa :

“Masyarakat merasa terbantu dengan pelaksanaan pendidikan gratis, karena tidak perlu lagi membayar uang sekolah”.

Menurut Willian, efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Hasil penelitian ini pada dasarnya mendukung penelitian oleh (Souliisa, 2017) Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, hasil implementasi kebijakan dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari kebijakan tersebut.

- Efisiensi, tujuan dilaksanakannya pendidikan gratis adalah untuk membantu meringankan orang tua siswa dalam membiayai pendidikan anaknya. Fungsi kebijakan pendidikan gratis adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Hasil penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara kepada Kepala Sekolah menyatakan bahwa :

“Penggunaan dana pendidikan gratis sudah mencukupi untuk menunjang pelaksanaan standart minimal pendidikan di sekolah. Kekurangan terjadi dalam kegiatan pengembangan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler serta untuk biaya siswa dalam mengikuti perlombaan”.

Efisiensi dalam implementasi kebijakan berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Efisiensi juga berkenaan dengan keoptimalan sumber daya untuk mengusahakan tercapainya tujuan kebijakan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah sumber daya dan usaha yang optimal. Jika tidak tersedia sumber daya yang optimal maka implementasi kebijakan akan terkendala dan bisa jadi tujuan kebijakan tidak dapat dicapai.

- Kecukupan, pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan sudah cukup memuaskan kebutuhan masyarakat dalam pendidikan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat pendidikan merupakan suatu kebutuhan, yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan gratis membebaskan segala biaya pendidikan yang sebelumnya ditanggung oleh orang tua siswa”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan gratis sudah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasaman dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan gratis memberikan kesempatan kepada usia belajar untuk mendapatkan pendidikan seluas-luasnya dengan membebaskan biaya pendidikan. Kecukupan berkenaan dengan pengukuran seberapa jauh kebijakan yang ada dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Kebijakan pendidikan gratis dilaksanakan untuk memuaskan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh (Soulisa, 2017) dan penelitian ini dapat dilihat bahwa, kecukupan hasil implementasi kebijakan dapat dilihat dari kebermanfaatan kebijakan dalam mengurangi masalah yang ada di masyarakat.

- Pemerataan, dinyatakan salah satu fungsi pendidikan gratis adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu, yang dimaksud memberikan kesempatan yang seluas-luasnya adalah kesempatan untuk memilih sekolah dalam wilayah Kota Padang Sidempuan baik negeri maupun swasta tanpa membeda-bedakan masyarakat miskin dan kaya.

Dalam penelitian yang penulis lakukan pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan sudah dilaksanakan dengan berorientasi pada pemerataan kebijakan. Karena dalam penganggaran pendidikan gratis didasarkan pada jumlah siswa yang aktif/bersekolah pada waktu penganggaran. Sehingga pelaksanaan pendidikan gratis diselenggarakan dengan merata tanpa membeda-bedakan siswa berdasarkan status ekonomi ataupun hal lainnya. Pemerataan berkaitan dengan keadilan yang diberikan oleh pelaksana kepada sasaran kebijakan. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan mendistribusikan akibatnya atau usahanya didistribusikan secara adil.

Hasil penelitian ditemukan hasil pemerataan hasil implementasi kebijakan belum cukup baik, karena hanya beberapa orang/pihak saja yang merasakan manfaat dari implementasi kebijakan. Bahwaa hasil implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan sudah dirasakan merata oleh sasaran kebijakan, karena dalam pendidikan gratis dirasakan oleh semua siswa yang terdaftar (aktif) di sekolah, tanpa ada perbedaan.

- Rresponivitas, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, tanggapan sasaran terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis sangat baik. Dengan wawancara orangtua yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat merasa terdukung dengan adanya pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan”.

Pemindahan kewenangan pendidikan Sekolah Menengah ke Provinsi mengakibatkan diberhentikannya pemberlakuan kebijakan pendidikan gratis untuk tingkat Sekolah Menengah (SMA-sederajat) atas keadaan tersebut masyarakat berharap pelaksanaan pendidikan gratis ini dapat terus dilanjutkan hingga ke tingkat Sekolah Menengah bukan hanya di tingkat Pendidikan Dasar (SMP/SD-sederajat).

Responsivitas dalam implementasi kebijakan (program) publik diartikan sebagai tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, yaitu responsivitas masyarakat sasaran yang cukup baik dalam implementasi kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan dan harapan dari masyarakat sasaran terhadap pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan temuan tersebut indikator responsivitas dalam evaluasi hasil kebijakan dapat dilihat dari respon sasaran kebijakan.

- Ketepatan, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan bahwa :
“Pendidikan gratis sudah tepat untuk dilaksanakan di Kota Padang Sidempuan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kota Padang Sidempuan sehingga yang berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kota Padang Sidempuan”.

Pendidikan gratis adalah salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, sehingga sangat tepat untuk dilaksanakan di Kota Padang Sidempuan. Ketepatan berkaitan dengan kerasionalan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasa penting oleh publik. Ketepatan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak dan tepat (Dunn, 2003). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketepatan dalam hasil implementasi kebijakan dapat dilihat dari ketepatan kebijakan untuk menjadi solusi atas masalah yang sedang dihadapi masyarakat.

Pada pelaksanaan program sekolah gratis secara umum sangat membantu masyarakat miskin, seperti perkembangan jumlah lembaga pendidikan yang terus bertambah, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, menurunnya angka putus sekoah, Buta aksara setiap tahun semakin menurun. Seiring dengan perkembangan pembangunan pendidikan jumlah lembaga pendidikan terus bertambah setiap tahunnya hal tersebut karena pemerintah secara terus menerus melaksanakan pembangunan gedung sekolah baik unit sekolah baru maupun penambahan ruang kelas untuk sekolah negeri maupun swasta.

Penyelenggaraan pendidikan gratis bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah, meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan, serta meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global. Selain itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan gratis untuk memenuhi mutu dan produktivitas SDM yang unggul. kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, relevan dan bermutu adalah merupakan hak dari setiap warga negara sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Simpulan

Kebijakan pendidikan gratis yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan sangat ideal dan mulia, tapi pada tataran implementasi kebijakan masih ditemukan adanya hambatan dan gesekan dari sisi koordinasi pemerintahan dengan para bupati/walikota, baik secara teknis maupun secara administratif oleh karena belum adanya regulasi yang tegas memberi tugas-tugas pemerintahan ke pemerintah kab/kota. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Efektifitas Implementasi pendidikan gratis dari segi Efektivitas, tujuan kebijakan sudah dicapai, sehingga implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan sudah efektif. Efisiensi, jumlah dana atau anggaran pendidikan gratis sudah cukup optimal untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kekurangan terjadi pada pelaksanaan kegiatan pengembangan siswa dan sekolah. Kecukupan, pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan sudah cukup memuaskan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Pemerataan, pelaksanaan pendidikan gratis sudah dilaksanakan dengan merata dan adil, penganggaran pelaksanaan pendidikan gratis berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar aktif disekolah tanpa ada perbedaan. Responsivitas, respon masyarakat sasaran dalam pelaksanaan pendidikan gratis cukup baik, masyarakat mendukung pelaksanaan pendidikan gratis dan mengharapkan pendidikan gratis tetap dilanjutkan. Ketepatan, pendidikan gratis memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk memperoleh pendidikan seluas-luasnya hingga ke tingkat sekolah menengah secara gratis.

Referensi

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell., J. (2012). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diastuti, Rika Arwin, 2017. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Smp Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017. Proggi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press.
- Lazwardi, D. (2017). Implementasi Evaluasi Program Pendidikan. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam VII (II)*, 143.
- Mahendra, Agus P., Putra, I Nyoman Darma, Pujaastawa, Ida Bagus Gede. 2020. Kebijakan Pendidikan Bermotif Politik: Pengembangan Pendidikan Dasar Melalui Pembagian Laptop Gratis di Kabupaten Badung, Bali. Pusat Penelitian Kebudayaan dan Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana
- Meter, V. D. (1975). The Policy Implementation Process. *A Concentual Framework in Administration and Society* v, 445-485.
- Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Nasarudin, T. M. (2016). Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan. *Jurnal Hukum Novelty*, 39-154.
- Samrin, Samrin. 2015. "Kapitalisme dan Pendidikan Liberal-Kapitalistik." *Shautut Tarbiyah* 21 (2): 130–146
- Siswanto. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

-
- Soulisa, N. S. (2017). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Palu. *Jurnal Katalogis*, 91-98.
- Suryono, A. (2014). Kebijakan Publik Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 98.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. . Surabaya: CV Cutra Media.
- Wildavsky, A. d. (2012). *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Yogyakarta: Universitas Proklamasi 45.
- Zahrawati, Fawziah. 2020. "Pembebasan Jerat Feminisasi Kemiskinan." *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 2 (1): 9–16